BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya ialah serangkaian upaya kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan berfokus pada distribusi pendapatan secara keseluruhan (Widyapangesti, & Soelistyo, 2022). Tujuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap negara adalah untuk membangun pembangunan yang dirasakan setiap masyarakat secara holistik melalui peningkatan jumlah usaha dan pembangunan, peningkatan tingkat pendidikan serta peningkatan teknologi. Kemudian diharapkan kesempatan kerja semakin meningkat, tingkat pendidikan meningkat, serta kesejahteraan masyarakat meningkat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sukirno (2006:3) dalam (Prihatini, Wibisono, & Wilantari, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk 275,77 juta jiwa. Jumlah Penduduk yang tinggi biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita wilayah tersebut, secara umum mengambarkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Permasalahan yang seringkali dihadapi negara-negara berkembang erat kaitannya menggunakan perseteruan ketenagakerjaan, karena total kesempatan kerja yang disediakan terbatas dan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja. Kesempatan kerja yang terbatas dapat menyebabkan penganguran. Kesempatan kerja yang terbatas dapat menyampaikan dampak langsung serta tidak langsung

mempengaruhi kesetabilan ekonomi. Diketahui Jumlah penduduk Pulau Sumatera mencapai 59,77 Juta jiwa pada juni 2022. Tingginya jumlah penduduk diyakini berpotensi besar dalam penyeimbangan lapangan kerja (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Disisi lain tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan bagi pembangunan ekonomi. Diketahui bahwa angka pengangguran di Pulau Sumatera termasuk tergolong tinggi setelah pulau jawa dari pulau lainya yang berada di Indonesia. Pada tahun 2018 pengangguran terbuka di Pulau Sumatera mencapai 5,057% dimana angka tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah wajib menyiapkan sumber daya manusia untuk memperoleh keterampilan. Keterampilan ini dapat diajarkan dengan pembinaan serta pendidikan. Keterampilan tersebut artinya landasan bagi pekerja untuk menerima keahlian yang sesuai serta dapat bersaing dengan pekerja luar. Peningkatan keterampilan serta kreativitas tenaga kerja tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Gambar 1.1 Perbandingan tingkat pengangguran berdasarkan pulau di Indonesia tahun 2018-2023 (Persen)

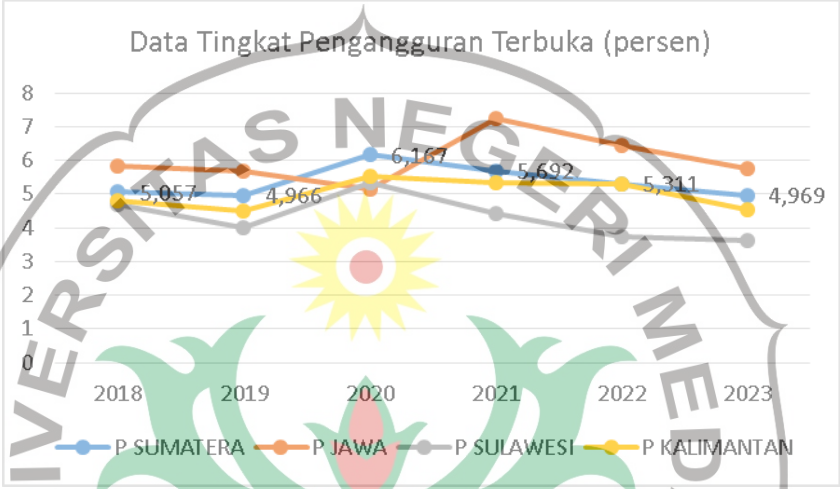

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, diolah

Gambar 1.1 memberikan pernyataan bahwa taraf pengangguran terbuka di Pulau Sumatera relatif tinggi, ke 2 setelah Pulau Jawa, yaitu sebesar 5,057% di tahun 2018. Angka tersebut meningkat mencapai 6,167% di tahun 2020. Tren tingginya angka pengangguran menandakan adanya permasalahan perekonomian di pulau tersebut ditimbulkan oleh faktor lapangan kerja. Oleh sebab itu, peningkatan lapangan kerja khususnya di Pulau Sumatera perlu segera dilakukan agar angka pengangguran tidak semakin tinggi, sebab jumlah penduduk Pulau Sumatera terus semakin meningkat. Hal ini juga menunjukan bahwa kesejahteraan dan tingkat hidup masyarakat pada Pulau Sumatera masih perlu ditingkatkan.

Menurut (Handoko, 1985) serapan tenaga kerja adalah sejumlah tenaga kerja yang digunakan pada suatu unit usaha tertentu dibandingkan dengan tenaga kerja yang digunakan pada suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja terjadi karena adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Menurut (Kuncoro, 2002),

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

serapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang ditempati oleh sejumlah besar tenaga kerja. Penduduk yang bekerja diserap dan didistribusikan ke berbagai sektor perekonomian.

Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu faktor utama yang mencerminkan syarat perekonomian yang dinamis. Penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting menentukan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain pemberdayaan masyarakat miskin (melawan kemiskinan) serta mendorong pertumbuhan (menaikkan pertumbuhan), penyerapan tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan peningkatan lapangan kerja menjadi rencana krusial (Kuncoro, 2002:73). Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan nasional, taraf investasi dan upah tenaga kerja. Perubahan faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat pendapatan kerja.

Dari ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo serta Thomas Robert Malthus, selalu terjadi perlombaan antara tingkat perkembangan produksi dan taraf perkembangan penduduk, yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Sebab penduduknya juga bekerja, maka akan sulit menciptakan lapangan kerja. Jika rakyat bisa mendapatkan pekerjaan maka akan menaikkan kesejahteraan bangsa, tetapi jika mereka tidak bisa menerima pekerjaan, berarti mereka akan menderita kemiskinan yang justru mengakibatkan taraf hidup di negaranya menurun. (Irawan dan Suparmoko, 2002) dalam (Meilasari, 2021).

Gambar 1.2 Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 (Jiwa)

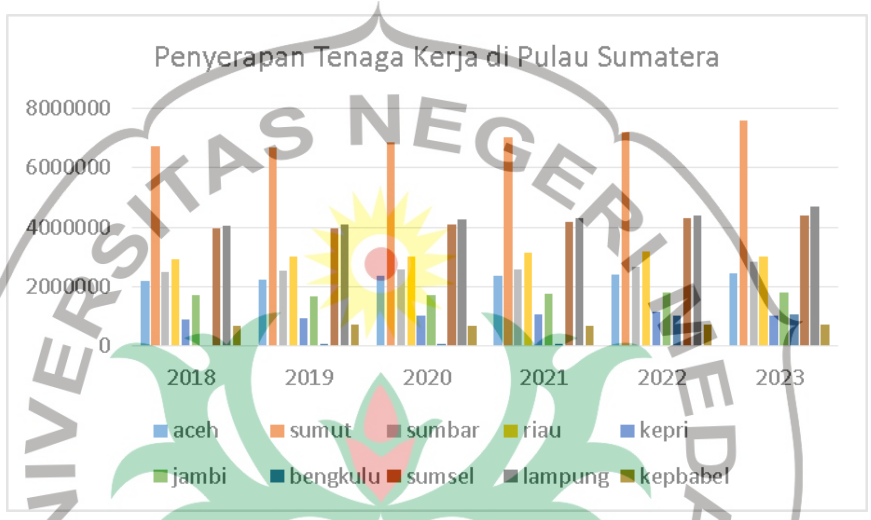

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.2 diagram tersebut menggambarkan total penyerapan tenaga kerja pada Pulau Sumatera berfluktuasi akibat dampak siklus perekonomian yang belum stabil. Pada enam tahun terakhir (2018-2023), Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah dengan taraf penyerapan tenaga kerja tertinggi, yakni mencapai 6.738.431 jiwa pada tahun 2018 dan mencatat penurunan sebesar 6.681.224 jiwa pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan mencapai 6.842.252 jiwa penduduk hingga tahun 2023 mencapai 7.556.942. Penurunan ini disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan antara angkatan kerja menggunakan jumlah perusahaan yang membuka lowongan kerja akibatnya mengurangi kesempatan kerja atau pencarian kerja. Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sebab pertambahan penduduk dan angkatan kerja yang sangat besar tidak diimbangi dengan tersedianya kesempatan

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

kerja, sehingga mengakibatkan penurunan yang besar. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat tingkat penyerapan tenaga kerja terendah di Pulau Sumatera pada tahun lalu (2018-2022). Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disebabkan oleh adanya kendala yang dihadapi sektor industri yang tidak dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta adanya risiko ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja. Keterampilan yang dimiliki tenaga kerja lokal dan kebutuhan industri di daerah juga dapat mempengaruhi kemampuan kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas, namun lebih serius dan mempunyai penyebab yang berbeda-beda. Masalah ketenagakerjaan terbesar adalah ketidakmampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan kecepatan yang sesuai dengan laju pertumbuhan produksi industri. Seiring dengan perubahan lingkungan makroekonomi di sebagian besar negara berkembang, kemiskinan meningkat dengan cepat, terutama karena "terbatasnya permintaan" akan tenaga kerja yang menurun karena faktor eksternal seperti memburuknya kondisi keseimbangan dan pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya. Hal ini pada gilirannya mengurangi pertumbuhan industri, tingkat upah dan pada akhirnya lapangan kerja (Todaro, 2003).

Faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau pengeluaran

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan investasi juga menentukan perkembangan ekonomi daerah. Karena dengan adanya investasi juga dapat mendorong perkembangan teknologi dalam meningkatkan kesempatan kerja yang baru.

Agar memperoleh pembangunan ekonomi, pemerintah menggunakan berbagai cara, diantaranya ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara berinvestasi. Penanaman modal terbagi atas dua bagian yaitu penanaman modal asing (PMA) serta penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ke 2 jenis investasi ini, yaitu PMA serta PMDN, bisa mendukung peningkatan kinerja produksi yang kemudian berimplikasi agar penyediaan pekerja untuk mendukung aktivitas produktif perusahaan. Kegiatan investasi akan memotivasi masyarakat agar tetap produktif pada menghasilkan barang serta jasa agar pendapatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat (Sandika et all., 2014)

Investasi memegang peranan penting dalam menyerap pekerja yang ada di pasar tenaga kerja dan kegiatan investasi diperlukan agar dapat mendorong peningkatan produksi. Sesuai teori yang disampaikan Keynes, menemukan bahwa investasi mempunyai pengaruh positif terhadap lapangan kerja. Kehadiran

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

investasi akan menaikkan modal, sebagai akibatnya mendorong terciptanya barang modal sebagai akibatnya membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Menurut teori Todaro (2006), Investasi merupakan bagian yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi meningkatkan modal sehingga produksi meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Gambar 1.3 Realisasi Investasi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 (Rupiah)

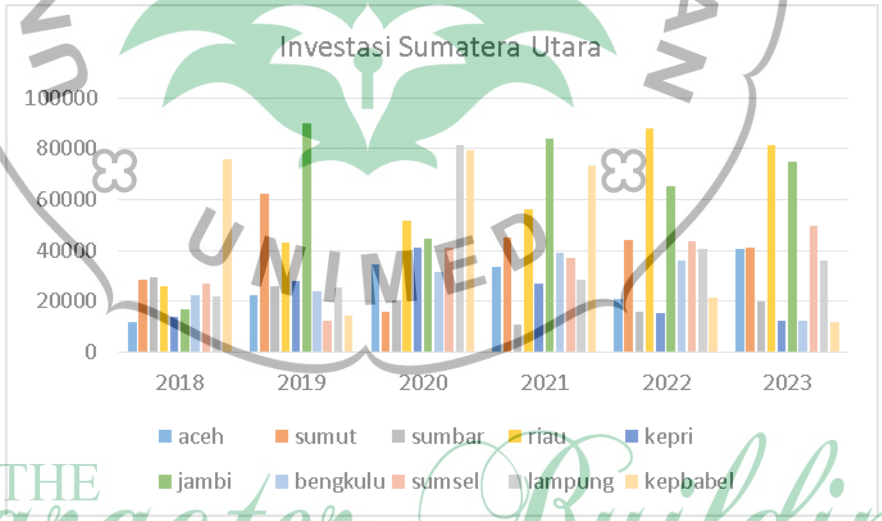

Sumber : Badan Pusat Statistik,2023

Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa perkembangan hubungan investasi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil sehingga menyebabkan fluktuasi investasi. Ketika perekonomian melemah, investor tidak akan berinvestasi di wilayah tersebut dan sebaliknya. Capaian Investasi tertinggi adalah Provinsi Jambi. sebagai penghasil sumber daya alam minyak, gas, dan hutan yang

melimpah, menunjang investasi sektor energi dan kehutanan. Dalam enam tahun terakhir (2018-2023), angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan provinsi lain, dan hal ini tidak sejalan dengan angka penyerapan tenaga kerja tertinggi di Pulau Sumatera yakni Provinsi Sumatera Utara. Dampak investasi berbasis lapangan kerja masih terbatas karena investor lebih tertarik pada investasi padat modal atau teknologi dibandingkan investasi padat karya.

Berdasarkan data grafik tersebut, Investasi Provinsi Jambi mencapai Rp 167053 pada tahun 2018. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai Rp. 897993,7. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp 445380,2 ini disebabkan oleh kondisi global yang tidak stabil akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih berlanjut atau dirasakan pada sektor perekonomian pada tahun 2021 sehingga mengakibatkan melemahnya harga komoditas secara signifikan dan penurunan produksi yang berdampak pada melemahnya harga komoditas secara signifikan. Keputusan yang mempengaruhi investasi dan mendesak investor untuk berhati-hatilah dan pertimbangkan risiko besar sebelum berinvestasi.

Investasi berfungsi untuk meningkatkan perekonomian serta dapat menaikkan taraf hidup masyarakat jangka panjang. Menurut (Sukirno, 2005) strategi investasi yang berhasil dapat berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian dan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan nasional. Namun menurut data, tidak semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja seiring dengan peningkatan modal investasi daerah.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED THE Character Building UNIVERSITY

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Annisa Yulianti, 2021), (Taqiyyuddin, 2021), (Fadli, 2017) yang menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena dalam menggunakan investasinya, pengusaha lebih cenderung membeli barang modal berupa mesin untuk menunjang proses produksi perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien. Berkat penggunaan mesin ini, konsumsi tenaga kerja menjadi rendah. Hubungan negatif antara investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak sejalan dengan pernyataan tentang permintaan tenaga kerja yang menyatakan bahwa semakin tinggi investasi maka penyerapan tenaga kerja semakin besar.

Selain investasi, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu PDB daerah/PDRB (Azhari, 2017). PDB Daerah adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu konstruksi atau badan usaha di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDB daerah dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja, dengan asumsi bahwa ketika PDB meningkat maka total nilai tambah produksi atau penjualan seluruh pelaku ekonomi di wilayah tersebut meningkat. (Widdyantoro, 2013).

Proses pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi diawali dengan peningkatan produksi penjualan di seluruh unit ekonomi suatu wilayah, yang akan meningkat karena adanya peningkatan lapangan kerja. Semakin banyak produksi atau penjualan yang dimiliki suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin

terdorong untuk mempekerjakan tenaga kerja agar produksi dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja ditingkatkan secara langsung. Menurut teori Keynes (Boediono, 1998) perdagangan hanya mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. apabila produksi bertambah maka jumlah pekerja akan meningkat. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi yang menyatakan bahwa peningkatan produksi hanya dapat dicapai jika penggunaan input (tenaga kerja) ditingkatkan. Permintaan barang dan jasa dalam perekonomian mempengaruhi tingkat output yang perlu diproduksi sehingga mempengaruhi penggunaan input (tenaga kerja). Karena menurut teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan terhadap input berasal dari permintaan terhadap output, artinya permintaan terhadap input hanya muncul ketika terdapat permintaan terhadap output.

PDRB dapat mempengaruhi jumlah pekerja yang dipekerjakan, jika diasumsikan bahwa ketika total PDRB meningkat, maka nilai tambah produksi atau distribusi di seluruh entitas ekonomi di suatu wilayah juga meningkat. Peningkatan produksi atau penjualan yang dicapai perusahaan akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga produksi dapat ditingkatkan untuk mengimbangi peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014). Atau dengan kata lain, ditemukan bahwa peningkatan PDRB menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin meningkat PDRB maka jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan meningkat

ketika produksi barang dan jasa atau PDRB juga meningkat. Terdapat hubungan positif antara PDRB dan lapangan kerja.

Gambar 1.4 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan di Pulau Sumatera tahun 2018 -2023 (Miliar Rupiah)

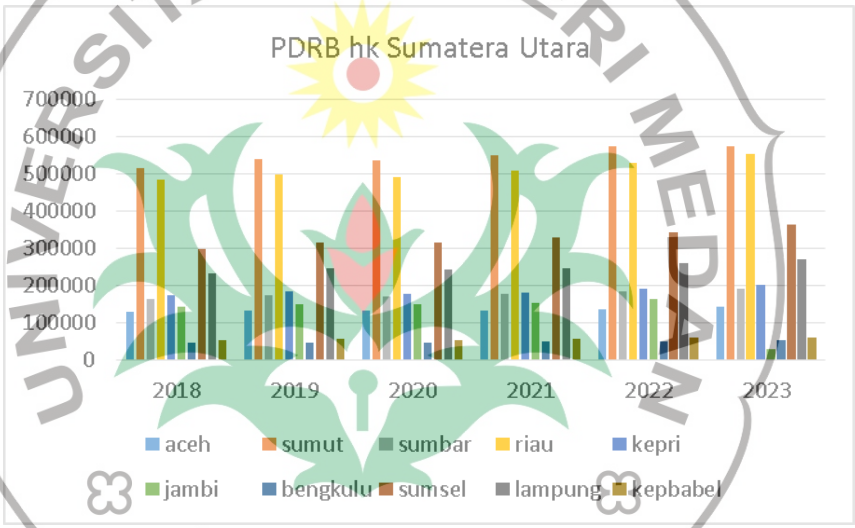

Sumber : Badan Pusat Statistik,2023

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa PDRB wilayah kepulauan Sumatera mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. PDRB tertinggi Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp. 512.762,63 miliar, angka ini meningkat menjadi Rp. 539.513,85 miliar pada tahun 2019 kemudian turun menjadi Rp. 533.746,36 miliar pada tahun 2020, dan angka tersebut akan meningkat lagi pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai Rp 573.528,77 miliar pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh serangkaian perubahan iklim ekstrem yang berdampak pada sektor-sektor perekonomian utama di wilayah tersebut, antara lain musim kemarau panjang, banjir, angin kencang, atau badai yang mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan kerugian besar bagi penduduk, masyarakat dan perusahaan-

perusahaan selain ketidakstabilan dalam produksi dan pendapatan, yang pada gilirannya menyebabkan lebih rendahnya kontribusi terhadap PDRB daerah.

Selain itu, pandemi juga berdampak langsung pada melambatnya aktivitas perekonomian, penurunan produksi, dan penurunan konsumsi yang signifikan pada tahun tersebut. Sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan nilai total PDRB terendah. Hal ini disebabkan masih besarnya ketergantungan terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan peternakan. Pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, namun produktivitasnya lebih rendah dibandingkan sektor perekonomian lain yang lebih maju secara teknologi.

Hubungan positif PDB dengan penyerapan tenaga kerja didukung oleh penelitian sebelumnya (Hafiz, Meidy Haviz, & Ria Haryatiningsih, 2021), (Agung Pratama, Muljaningsih, & Asmara, 2021), (Iksan, Arifin, & Suliswanto, 2020) juga sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin pada laju pertumbuhan produk domestik bruto daerah (PDRB) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, belum sesuai harapan. Tambahan tenaga kerja yang terserap relatif kecil. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Perubahan upah dapat mempengaruhi lapangan kerja. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya produksi, sehingga pengusaha akan menanggung biaya produksi yaitu Upah minimum memungkinkan diperolehnya keuntungan yang optimal. Kenaikan tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya juga meningkatkan harga setiap unit

barang yang diproduksi (Sumarsono, 2003). Jika harga suatu produk naik, konsumen mengurangi konsumsi atau mengurangi persetujuan terhadap produk tersebut, akibatnya banyak barang yang tidak terjual dan produsen terpaksa mengurangi volume produksi dengan asumsi perusahaan menggunakan teknologi padat karya. Mengurangi target produksi perusahaan memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Ketika upah minimum pekerja tersebut berada di atas tingkat rata-rata upah, maka permintaan pengusaha terhadap pekerja tersebut cenderung menurun yang berarti kesempatan kerja semakin berkurang. Di sisi lain, ketika upah minimum pekerja berada di bawah tingkat rata-rata upah, permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja dan kesempatan kerja meningkat (Mankiw, 2006).

Perubahan upah minimum juga dapat mempengaruhi lapangan kerja, mengikuti peraturan upah minimum tentu berbeda-beda di setiap daerah karena ditentukan oleh berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia dan produktivitas.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Gambar 1.5 Upah minimum Provinsi (UMP) di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 (Rupiah)

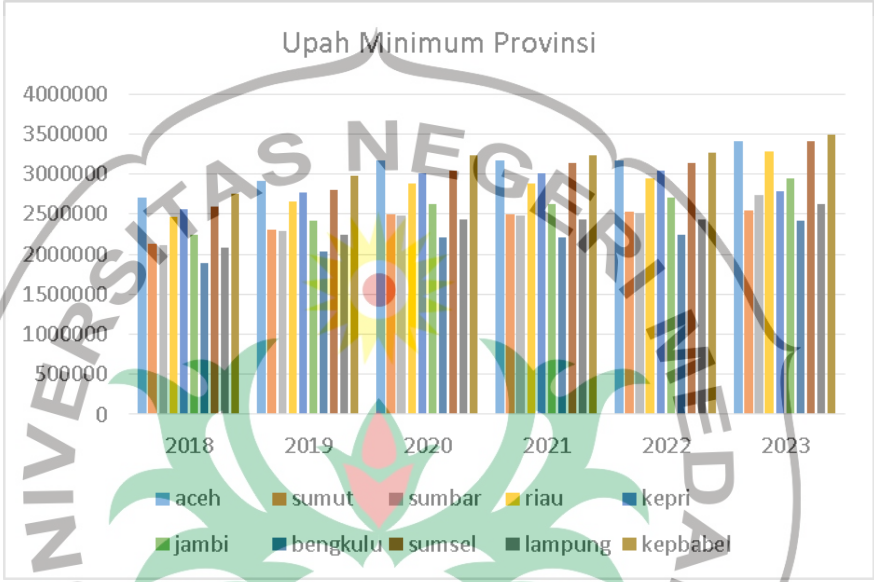

Sumber : Badan Pusat Statistik,2023

Tingkat upah ataun pendapatan merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan penduduk yang bekerja. Dari Gambar 1.5 di atas terlihat bahwa upah UMP di Pulau Sumatera cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini terlihat dari meningkatnya biaya hidup dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung merupakan salah satu provinsi dengan nilai UMP tertinggi yaitu mencapai Rp2.755.444 juta pada tahun 2018 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2022 mencapai Rp3.264.884 juta.

Secara umum besaran upah di Pulau Sumatera tidak mengalami kenaikan (tetap) pada tahun 2021 karena mengikuti peraturan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.M/11/HK.04/ Tahun 2020. Kecilnya kenaikan UMP pada tahun 2021 disebabkan oleh perlambatan perekonomian

akibat pandemi COVID-19, menurunnya pendapatan dunia usaha, dan adanya keputusan antara pengusaha dan pekerja.

Pemerintah daerah menyesuaikan upah minimum untuk mencerminkan kenaikan biaya hidup atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kebijakan-kebijakan ini tercermin dalam peraturan dan negosiasi antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Dengan demikian menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja di Pulau Sumatera sesuai dengan teori (Mankiw, 2003) Ketika upah pendapatan pekerja tinggi maka dapat meningkatkan tingkat produktivitas pekerja. Ketika upah meningkat, pendapatan pekerja juga meningkat, dan dengan itu, keinginan pekerja untuk memperoleh suatu produk juga meningkat, sehingga menghasilkan permintaan agregat yang lebih tinggi. Dengan adanya permintaan terhadap suatu produk atau jasa, diperlukan tambahan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu output, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Teori ini sejalan dengan penelitian (Ikka Dewi, 2013) mengenai dampak tingkat investasi dan upah terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara, yang menemukan bahwa tingkat upah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Jika upah naik sebesar 1%, maka kesempatan kerja juga meningkat sebanyak 6.728.431 orang pada tahun 2018. Kenaikan upah tercermin dari peningkatan konsumsi pekerja sehingga menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan barang dan jasa menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini

menunjukkan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Upah minimum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan disepakati oleh masing-masing daerah melalui peraturan pemerintah, yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, kemampuan perusahaan, produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia. (Ehrenberg, 2003) menunjukkan bahwa rasio upah mempunyai hubungan negatif dengan penyerapan energi tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan berkurang ketika rata-rata upah pekerja meningkat.

Meskipun kenaikan upah dapat meningkatkan lapangan kerja melalui peningkatan konsumsi, dalam beberapa kasus kenaikan upah itu sendiri mempunyai dampak negatif terhadap lapangan kerja. Menurut (Sumarsono, 2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi perusahaan. (Katherine, 2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat upah mempunyai dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, karena setiap kenaikan upah minimum sebesar setiap 10% maka terjadi penurunan pekerja di masing-masing sektor sebesar 1,09%. Menurut (Kuncoro, 2002), peningkatan upah menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika tingkat upah meningkat sementara harga input lainnya tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dibandingkan input kain. Hal ini mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang lebih murah untuk mempertahankan keuntungan. Upah yang lebih tinggi juga menyebabkan perusahaan menaikkan harga per unit produknya, sehingga

konsumen cenderung mengonsumsi produk tersebut dalam jumlah yang lebih kecil. Hal ini mengakibatkan sebagian besar produksi tidak laku dan produsen terpaksa mengurangi volume produksi. Mengurangi kuantitas produksi pada akhirnya menyebabkan berkurangnya jumlah pekerjaan.

Berdasarkan perbedaan penafsiran tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera khususnya pada bidang PMDN, PDRB dan Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan judul:

"Pengaruh PMDN, PDRB, Upah Minimum Propinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera".

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang hingga saat ini, permasalahan yang teridentifikasi dalam investigasi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera mengalami penurunan pada tahun 2018-2019.
2. Penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan pada tahun 2021
3. PDB daerah Sumatera tercatat mengalami penurunan pada tahun 2020
4. Tidak ada kenaikan upah minimum tingkat provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020-2021.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini, maka dilakukan batasan-batasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2018-2022.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu PMDN, PDRB dan Upah Minimum Kabupaten (UMP) di Pulau Sumatera periode 2018-2022.
3. Sasaran penelitian adalah 10 provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2018-2022 antara lain Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Kepulauan Belitung.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.4 Rumusan Masalah

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra ?
3. Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera ?
4. Bagaimana pengaruh antara PMDN, PDRB, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh PMDN, PDRB dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain.
2. Secara Praktis
   a. Untuk peneliti : penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh
   b. Untuk akademisi : penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Penyerapan Tenaga Kerja.

Untuk masyarakat : penelitian dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor dan pengaruh dari PMDN, PDRB, Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera, sehingga masyarakat dapat menyiapkan diri dan mengambil langkah tepat untuk mengembangkan potensi diri dan merencanakan apa yang harus dipersiapkan dimasa mendatang.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY